

Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia

Faizal Arifin

Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum Tasikmalaya

faizalarifin@stiabiru.ac.id

Suggested Citation:

Arifin, Faizal. (2021). Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: pp 542-546. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.13390>

Article's History:

Received June 2021; Revised November 2021; Accepted November 2021.

2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This book provides a kind of strategic recommendation or sharing of strategies and organized efforts, namely for Islamic organizations, institutions and communities in the form of 12 recommendation points to avoid infiltration and "attacks" from various hard-line groups. That is an invitation to continue learning, stop and break the spread of hard-line understanding, raise awareness the elites, realizing Pancasila that reflects Sharia for all beings. In collaboration with NU clerics with the understanding of Ahlussunnah wal Jama'ah, in collaboration with scholars, intellectuals, culturalists, educational practitioners, entrepreneurs, creating clean, fair and law-abiding government institutions, fostering understanding and awareness of the noble values of Islam, building a network of the Red-White love movement, as well as growing confidence and pride that the traditions and culture of the nation itself are in line with the religious teachings of the Indonesian people.

Keywords: *clean government; Islamic organizations; national culture; extremism; nationalism*

Abstrak

Buku ini memberikan semacam rekomendasi strategis atau berbagi strategi serta usaha terorganisasi yaitu bagi organisasi Islam, institusi maupun masyarakat berupa 12 poin rekomendasi untuk menghindari infiltrasi dan "serangan" dari berbagai kelompok garis keras yaitu ajakan terus belajar, menghentikan dan memutus penyebaran paham garis keras, menyadarkan para elit, mewujudkan Pancasila yang merefleksikan Syariah untuk semua makhluk, bekerjasama dengan kyai NU berpaham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, bekerjasama dengan ulama, intelektual, budayawan, praktisi pendidikan, pengusaha, mewujudkan insitusi pemerintahan yang bersih, adil, dan taat hukum, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran nilai luhur Islam, membangun jaringan gerakan cinta Merah-Putih, serta menumbuhkan keyakinan dan kebanggaan bahwa tradisi dan budaya bangsa sendiri sejalan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia.

Kata Kunci: pemerintahan bersih; organisasi Islam; budaya nasional; paham garis keras; nasionalisme

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah review atas buku: Abdurrahman Wahid (Ed.), *Ilusi Negara Islam (Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia)*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, 322 hlm., ISBN: 978-979-98737-7-4.

GARIS BESAR ISI BUKU

Ilusi dipilih sebagai diksi untuk mengawali judul hasil penelitian *LibForAll Foundation* yang berlangsung selama 2 tahun ini. Dua kamus terkemuka, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, memberikan definisi *illusion* sebagai *an idea or belief which is not true* (Cambridge University Press, 2005), sedangkan *Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary 5th Edition*, mereferensikan *an illusion is a false idea or belief* (Sinclair, 2006). Kedua referensi tersebut menyimpulkan bahwa ilusi merupakan ide atau kepercayaan yang salah, palsu, dan tidak benar. Oleh karena itu, sedari awal judul yang dipilih sudah menyimpulkan bahwa Negara Islam dalam konteks kekinian, bagi Indonesia, menurut Abdurrahman Wahid, hanyalah sebuah ilusi yang ide dan gagasannya dianggap berbahaya karena salah, palsu, dan tidak benar. Namun menurut Muhammad Ridha, ilusi merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk membebaskan diri serta menerobos dari keragu-ruguan terhadap kapitalisme dan penjajahan dalam konteks negara, lahirah kemudian 'Gelombang merah jambu' di Amerika Latin dan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah (Ridha, 2015, pp. 147–149). Gerakan trans-nasional untuk mewujudkan Negara Islam mulai hadir di Indonesia dan kemudian direspon oleh organisasi Islam termasuk dua sayap besar yaitu Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah, yang dalam buku direpresentasikan oleh Gus Dur, Buya Syafi'i Ma'arif, dan Gus Mus.

Syafi'i Ma'arif dalam *prolog*-nya menyatakan tiga teori terkait lahirnya gerakan fundamentalisme transnasional ini yaitu pertama kegagalan Umat Islam menghadapi modernisme, kedua rasa kesetiakawanan terhadap nasib yang menimpa saudaranya di Palestina, Kashmir, Afghanistan, Iraq, dan sebagainya, dan yang ketiga, karena kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan karena belum tegaknya keadilan sosial, belum terciptanya kesejahteraan masyarakat, dan *problem* politik kenegaraan lainnya (Wahid, 2009, pp. 7–10). Adapun Gus Dur, memilih istilah "Musuh dalam Selimut" yang merujuk pada beberapa oposisi terhadap konsep negara-bangsa yang sudah disepakati para *founding fathers*, seperti di masa lalu terdapat kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dalam Konstituante, atau melalui kekuatan bersenjata seperti DI/TII, kemudian di masa kini, dipelopori gerakan Wahabi atau Ikhwanul Muslimin dari Timur Tengah sebagai kelompok garis keras yang tengah merebut Islam Indonesia yang "*Islam with a smiling face*" – yang tengah mengekspansi dan mulai menginfiltrasi melalui tangan Partai Keadilan Sejahtera, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sampai Jamaah Islamiyyah (JI) yang menginginkan Khilafah (Wahid, 2009, pp. 17–27). Kondisi dan situasi itulah yang akhirnya melahirkan buku yang dianggap sebagai buku rekomendasi untuk menghadapi dan mengatasi gerakan Islam garis keras (NU Online, 2009).

Secara akademis, buku ini merupakan penelitian yang melalui metodologi yang jelas mulai dari dasar pemikiran, subyek studi, konsep yang relevan, batasan, sampai variabel, tujuan studi, dan seterusnya (Wahid, 2009, pp. 43–52). Studi ini bertujuan menemukan, menunjukkan, dan membuktikan asal-usul, ideologi, dan gerakan kelompok-kelompok garis keras di Indonesia, dan mengetahui respon para agen gerakan garis keras tentang isu-isu sosial-politik dan keagamaan. Kemudian berisi strategi praktis bagi "melawan" agenda gerakan Islam transnasional di Indonesia dan seluruh dunia, memobilisasi para pemimpin dan umat Islam yang "belum terkontaminasi" ideologi gerakan garis keras untuk secara sadar melawan penyebaran ideologi garis keras (Wahid, 2009, p. 47). Penelitian lapangan atau *Field Research* dilakukan di 24 kabupaten di 17 provinsi dan melibatkan tidak kurang dari 30 peneliti yang kebanyakan dari jaringan Universitas Negeri Islam (UIN), serta melibatkan wawancara mendalam terhadap 591 responden yang berasal dari 58 kelompok dan organisasi yang berbeda (NU Online, 2009; Wahid, 2009, pp. 49–57).

Riset berusaha memetakan asal usul, ideologi kelompok garis keras, dengan menunjukkan bahwa Gerakan Wahabi dan Ikhwanul Muslimin bukan termasuk *Ahlussunnah wal-jama'ah* (Wahid, 2009, p. 60). Lebih jauh ke belakang, gerakan Islam "garis keras" yang dipaksakan untuk dilabelkan dihubungkan dengan tabiat *Khawarij* yang menjadi pembangkang, ekstrim serta memiliki preseden buruk. Sejarah *Khawarij* tersebut kemudian dihubungkan dengan Ibn' Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi, yang ketika berkembang sudah tertutup melalui Literalisme (Wahid, 2009, pp. 62–66). Gerakan ini kemudian disebut mulai melakukan kekerasan seperti menghancurkan, "mengkafirkan" serta banyak membunuh sejak abad 18-20 M dan pengaruhnya terus hadir di berbagai wilayah di dunia (Wahid, 2009, pp. 65–77). Terlebih, ideologi ekstrim kemudian disebut sebagai "virus" yang pernah menulari gerakan yang memicu konflik di Sumatera Barat melalui gerakan Padri.

Dalam konteks Indonesia, gerakan trans-nasional wahabi dan garis keras yang "beroperasi" di Indonesia adalah pertama Partai Keadilan Sejahtera yang berafiliasi pada Ikhwanul Muslimin, kedua, Hizbut Tahrir Indonesia yang menginginkan Khilafah Islamiyyah, serta ketiga adalah Wahabi yang melakukan wahabisasi global melalui keinginan implementasi formalisasi Islam, aplikasi syari'ah sebagai hukum positif, atau khilafah Islamiyyah (Wahid,

2009, pp. 77–78). Tidak dilepaskan, menurut riset ini, bahwa gerakan Wahabi turut berkembang melalui peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) serta gerakan Tarbiyah dan Jama'ah Salafi (Wahid, 2009, p. 78). Kelompok-kelompok ini serta turunan maupun afliasinya, turut diposisikan oleh riset ini sebagai organisasi yang radikal, ekstrim, dan patut diwaspadai bahkan dianggap akan merebut eksistensi Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah.

Ideologi dan agenda gerakan garis keras di Indonesia, bersumber pada ideologi totalitarian-sentralistik serta politisasi syari'ah. Pandangan ini menampilkan keyakinan bahwa pengamalan syari'ah tidak dapat dilepaskan dari politik. Sebagai penjelasan, fakta-fakta sejarah berusaha dihubungkan dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang secara keras ingin aturan hukum Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari: individu maupun masyarakat (Wahid, 2009, pp. 120–122). Organisasi lain yang setuju mengenai pemberlakuan syariah dilebali organisasi “garis keras” seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), serta organisasi kelaskaran: Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar fi Sabilillah, dan lain-lain (Wahid, 2009, pp. 134–135). Konsep obsesi syari'ah kemudian terimplementasi melalui berbagai aturan dan peraturan daerah (perda) yang muncul sebagai akibat kemenangan kelompok garis keras pada bidang politik di berbagai daerah: Aceh, Tangerang, Cianjur, Padang, Bulukumba, dan wilayah lainnya, jumlahnya dapat mencapai 10% dari seluruh wilayah di Indonesia (Wahid, 2009, p. 136). Kesimpulan yang hendak ditarik dari pengamatan para peneliti adalah anggapan yang salah bahwa syari'ah merupakan solusi krisis multidimensi yang terjadi, seperti diyakini para pemeluk kelompok garis keras, sebaliknya menurut riset ini formalisasi syari'ah mendatangkan berbagai masalah.

Implementasi gagasan melalui gerakan kemudian dihadirkan melalui peran para agen “garis keras” yang melakukan infiltrasi terhadap Islam Indonesia. Infiltrasi pada organisasi menurut Haedar Nashir, melalui beberapa strategi yaitu 1) masuk ke lingkungan sepaham atau mirip, 2) menyembunyikan paham dan tujuan, 3) mengembangkan aktor atau pelaku yang memiliki militansi, 4) memanfaatkan suasana rentan, 5) melakukan teori belah-bambu, 6) menyuburkan benih kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, 7) menyuburkan idiom positif dari ideologinya, 8) melakukan *taqiyah*, 9) menampilkan diri sebagai “kekuatan alternatif”, 10) tumbuh pesat dalam organisasi, 11) memanfaatkan pihak tertentu, 12) memanfaatkan sarana/media (Wahid, 2009, pp. 176–177). Pembahasan organisasi atau organisasi Islam yang diinfiltrasi adalah “penyusupan” di Muhammadiyah, Nahdlatul 'Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga pendidikan/sekolah, instansi pemerintah dan swasta (Wahid, 2009, pp. 179–219), dimana kesemuanya berkesimpulan: kewaspadaan terhadap penyebaran kader PKS dan semacamnya.

Penelitian ini memberikan semacam rekomendasi strategis atau berbagi strategi serta usaha terorganisasi yaitu bagi organisasi Islam, institusi maupun masyarakat berupa 12 poin rekomendasi untuk menghindari infiltrasi dan “serangan” dari berbagai kelompok garis keras yaitu ajakan terus belajar, menghentikan dan memutus penyebaran paham garis keras, menyadarkan para elit, mewujudkan Pancasila yang merefleksikan Syariah untuk semua makhluk, bekerjasama dengan kyai NU berpaham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, bekerjasama dengan ulama, intelektual, budayawan, praktisi pendidikan, pengusaha, mewujudkan insitusi pemerintahan yang bersih, adil, dan taat hukum, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran nilai luhur Islam, membangun jaringan gerakan cinta Merah-Putih, serta menumbuhkan keyakinan dan kebanggaan bahwa tradisi dan budaya bangsa sendiri sejalan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia (Wahid, 2009, pp. 228–232).

TANGGAPAN KRITIS ATAS BUKU

Buku ini menarik untuk dibaca karena di dalamnya sangat komprehensif dalam menjelaskan politik lingkungan, baik secara teori maupun praktis. Di dalamnya dijelaskan beberapa pendekatan teoritis pada penanganan kasus lingkungan. Begitu juga secara praktis, buku ini menjelaskan gerakan-gerakan sosial masyarakat yang mencerminkan kepedulian pada lingkungan. Namun demikian, ada beberapa catatan kritis mengenai buku ini.

Secara jelas, buku ini juga menyebutkan khususnya PKS dan HTI sebagai musuh bersama atau *common enemy* yang harus diwaspadai, berbahaya, menginfiltrasi dan merebut “kekuasaan” di berbagai masjid Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah maupun “wilayah” lainnya. Kesimpulan tersebut sudah final bahkan sampai pada tataran rekomendasi strategis menghadapi bahaya infiltrasi tersebut. Penelusuran historis atas gerakan Islam “garis keras” terlalu memaksakan untuk menghubungkannya dengan gerakan *Khawarij* hanya karena persamaan memperlakukan teks suci secara literal, melalui paham literalisme, yang dianggap kaku, tidak dinamis, dan sebagainya. Pelabelan kelompok yang menginginkan formalisasi syari'ah dengan *khawarij* melalui narasi dan

argumentasi dalam riset, merupakan kesimpulan yang terlalu ekstrim. Jika merujuk pada gagasan Ian G. Barbour, dalam dunia Kristen dikenal istilah *Biblical Literalism* (yang *vis a vis* terhadap *Scientific Materialism* dari tipologi konflik) yang merujuk pada “ketaatan pada huruf yang tepat atau arti literal” (Waston, 2014, pp. 76, 80), serta meyakini kebenaran kitab suci secara abadi dan universal atau *inerrant thorough* (Arifullah, 2006, p. 7), menunjukkan bahwa literalisme juga dikenal dalam komunitas agama lain selain Islam dan tidak harus selalu dihubungkan dengan *khawarij*. Dalam konteks historis, kesimpulan riset mengenai asal usul terlalu bersifat “hitam-putih” bahwa Gerakan Wahabi selalu salah, keras, ekstrim, tidak toleran dan sebagainya. Yang menarik, menurut Alamul Huda dalam mengkritisi ekstrimisme, menyatakan bahwa cara pandang “hitam-putih” adalah cara pandang literal tekstual yang harus dihindari dan dapat berujung pada kekerasan (Huda, 2010, p. 183), oleh karena itu cara pandang Hitam-Putih peneliti terhadap Gerakan Wahabi pun perlu dikritisi karena menolak ekstrimisme dengan cara pandang ekstrimisme.

Labelisasi “garis keras” pada setiap kelompok yang berbeda dengan Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah, dalam riset ini, sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan pada demokrasi. Oleh karena itu, jika lembaga riset *LibforAll Foundation* memahami arti kebebasan itu sendiri, maka seharusnya ia tetap toleran terhadap beberapa peraturan daerah (perda) syariah yang secara legal dan konstitusional sudah sah diterapkan. Kesan bahwa lembaga riset liberal (terlebih didanai oleh ‘Barat’), yang hanya digunakan untuk “mengkafirkan” penganut formalisasi syariah atau fundamentalis, hanya semakin membuka ruang-ruang para ekstrimis untuk terus “memerangi” bahkan melakukan kekerasan. Bahkan stigma yang melabelisasi kelompok lain hanya karena perbedaan pandangan akan pemberlakuan syariat, hanya akan membuahkan perpecahan di Indonesia. Namun bagaimana pun, gerakan anti-transnasional yang dibangun memang memerlukan *common enemy* agar sasaran yang dituju dapat dipengaruhi untuk ikut kampanye anti-syariat misalnya melalui narasi trans-nasional.

Cara pandang hitam-putih lainnya, mengenai cara “mengkafirkan” yang digunakan peneliti dalam memandang Wahabi. Di satu sisi, riset mengkritisi bahwa Wahabi seringkali melakukan tindakan “mengkafirkan” (bahkan sampai terdapat 30 kata mengkafirkan yang disematkan pada kelompok garis keras dalam buku ini), namun di sisi lain, riset ini juga menyebut gerakan Wahabi sebagai kelompok yang dapat diindikasikan keluar dari *Ahlussunnah wal Jama’ah* karena kekerasan dan kekakuannya. Bahkan lebih dari itu, dihubungkan setiap kelompok yang mendukung formalisasi syariat akan dikelompokkan menjadi agen Wahabi yang memiliki akar pada kelompok *khawarij*. Secara jelas pun, disebutkan dalam beberapa teks tentang kewaspadaan akan bahaya dari kelompok Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bukan hanya PKS dan HTI, pengelompokan kelompok Islam pada label “garis keras” juga dilakukan pada kelompok yang menginginkan nilai-nilai syariah masuk dalam kenegaraan, hukum, dan diimplementasikan pada kehidupan individu maupun masyarakat. Bahkan, Gus Dur sangat vokal mengkritik Majelis Ulama Islam (MUI) karena ia dianggap sebagai dalang dibalik munculnya berbagai aksi kekerasan oleh kalangan Islam radikal dan menjadi bunker untuk mendikte pemerintah melalui agen Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Taufani, 2018, p. 212).

Pembahasan terakhir yang disampaikan adalah implementasi kebijakan pemerintah yang dianggap belum ideal melaksanakan cita-cita kemerdekaan karena belum tegaknya keadilan sosial, belum terciptanya kesejahteraan masyarakat, dan *problem* politik kenegaraan lainnya yang seharusnya ditunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar menjadi partai ideal sehingga meyakinkan publik bahwa kelompok Nahdlatul Ulama pendukung Gus Dur sudah menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan yang bersih, anti korupsi dan sebagainya. Jika misalnya Kementerian Agama masih dikritisi belum ideal, serta beberapa politisi PKB berkutut dengan kasus proyek dan koruptif, hal tersebut justru menjadikan umat Islam Indonesia tidak percaya dengan pemikiran yang disajikan penelitian ini. Jika hal tersebut terjadi, maka kebalikan dari kesimpulan buku ini terjadi: lebih baik menjadi radikal-transnasional, daripada partai ‘sebelah’ yang melakukan korupsi. Sama halnya dengan sebagian orang yang menyatakan, “kenapa harus menyalahkan HTI, padahal mereka tidak punya kekuasaan politik dan semua urusan negara sudah dipegang oleh ‘kalian’.

KESIMPULAN

Buku ini menyatakan bahwa resolusi konflik dan dialog yang seharusnya dilakukan semua pihak. Resolusi konflik dan dialog antar kelompok Islam dengan cara pandang yang terbuka dapat menjadi solusi untuk dapat saling memahami antar kelompok serta toleransi antar pemikir baik itu tekstual dan kontekstualis, formalis dan esensialis, fundamentalis dan liberalis, serta kelompok-kelompok pemikiran lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifullah, M. (2006). HUBUNGAN SAINS DAN AGAMA (Rekonstruksi Citra Islam di tengah Ortodoksi dan Perkembangan Sains Kontemporer). *KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1).
Cambridge University Press. (2005). *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*.
Huda, A. (2010). EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2). Retrieved from <http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir>
NU Online. (2009). Buku Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Diluncurkan. Retrieved July 10, 2021, from <https://www.nu.or.id/post/read/17209/buku-ilusi-negara-islam-ekspansi-gerakan-islam-transnasional-diluncurkan>
Ridha, M. (2015). Resensi Buku: Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. *Jurnal Al-Adyaan*, 1(2).
Sinclair, J. (2006). *Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary*. 교보문고.
Taufani. (2018). Pemikiran Pluralisme Gus Dur. *Jurnal Tabligh*, 19(2).
Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
Waston. (2014). HUBUNGAN SAINS DAN AGAMA: Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian G. Barbour. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 76–89. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/1968>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).